



## WEWENANG, ORGANISASI DAN DESENTRALISASI SISTEM PENGENDALIAN DALAM PEMERINTAHAN

Oleh:  
**Pandji Santosa**

### ABSTRAK

Terdapat dua alasan utama mengapa dalam pemerintahan diperlukan sistem pengendalian. Pertama rentang pengendalian mempengaruhi efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Terlalu melebarnya rentangan dapat berarti bahwa organisasi harus mengendalikan jumlah satuan kerja yang besar sehingga menyebabkan tidak efisien.

Rentangan yang terlalu sempit dapat menyebabkan eksistensi organisasi tidak efektif. Kedua, ada hubungan antara rentang pengendalian diseluruh organisasi dan struktur organisasi. Semakin sempit rentang manajemen, struktur organisasi akan berbentuk “*tall*” dengan banyak tingkat pengawasan diantara manajemen puncak dan tingkat paling rendah.

Rentang pengendalian yang melebar akan menghaslkan struktur yang berbentuk “*flat*” yang berarti tingkatan manajemen semakin sedikit. Fungsi pengendalian perlu dipahami, dilaksanakan dan dikembangkan oleh seluruh perangkat pemerintah daerah, sehingga dalam perjalanan dan perkembangannya misi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, efektif dan efisien di atas dapat dicapai sesuai dengan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

**Kata kunci:** Wewenang, organisasi, desentralisasi dan sistem pengendalian.



### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barnard, C. 1938. *The Functions of Executive*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Branch, Melville. 1975. *Urban Planning Theory*. Stroudsburg Pennsylvania: Dowden Hutchingson & Ross, Inc.
- Brewer, Garry D dan deLeon, Peter. 1983. *The Foundations of Policy Analysis*. Homewood Illinois: The Dorsey Press.
- Etzioni, Amitai. 1986. *Modern Organization*. New York: Prentice-Hall Inc.
- Gibson, James L., Ivancevich, John M., Donnely Jr, James H. 1987. *Organisasi: Perilaku, struktur, proses (alih bahasa oleh Djarkasih)*. Jakarta: Erlangga.
- Jones, Gareth R. 1995. *Organizational Theory : Text and cases*. Mesley Publishing Company, Inc.
- Miles, Robrt H. 1980. *Macro Organizational Behavior*. Santa Monica California: Godyeas Inc.
- Robbins, Stephen P. 1995. *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi Edisi 3*. Alih Bahasa Yusuf Udaya. Penerbit Arcon.
- Scott, W. Richard. 2003. *Organizations: Rational, Natural, dan Open Systems*. New Jersey: Upper Saddle River.
- Shafritz, Jay M and Hyde, Albert C. 1987. *Classics of Public Administration*. California: Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove.
- Steers, Richard M. 1977. *Organizational Effectiveness A Behavioral View (terjemahan Magdalena)*. Jakarta: Erlangga.



Sutherland, John W. 1978. Management Handbook For Public Administrators. New York: Van Nostrand Reinhold Company.

Terry, George R. 2000. Prinsip-Prinsip Manajemen ( Alih Bahasa : J. Smith DFM). Jakarta: Bumi Aksara.

Thompson, James D.. 1967. Organizations In Action. New York: McGraw-Hill.

Weichrich, Heinz., Koontz, Harold. 1994. Management A Global Perspective. Singapore: McGraw-Hill Book Co.

\*\*\*\*\*

## **PARADIGMA KUALITATIF** **(Suatu Tinjauan Filosofis Pendekatan Penelitian)**

Oleh:  
**Tati Sarihati**

### **ABSTRAKSI**

Secara filosofis penelitian untuk membuktikan atau menemukan sebuah kebenaran dapat menggunakan dua pendekatan, yang berlandaskan pada aliran atau paradigma filsafat positivisme dan aliran filsafat postpositivisme Hasil analisis penelitian kualitatif lebih bersifat ideographik, tidak dapat digeneralisasi lebih bersifat membangun, mengembangkan maupun menemukan terori-teori sosial.

**Kata Kunci: Paradigma, Kualitatif, Filosofi Penelitian**



### DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R & Biklen S. 1992. *Qualitative Research for Education*. Boston: MA: Allyn and Bacon
- Cresswell John W. 2002. *Research Design Qualitative And Quantitative Approches*. Thousand Oaks: Sage Publication
- Guba, Egon G. & Lincoln, Yvonna S. (1981). *Effective Evaluation*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers
- Kirk, J. & Miller, M.I. (1986). *Reability and Validity in Qualitative Research*, Vol.1, Beverly Hills: Sage Publication
- Lincoln, Yvonna S. & Guba, Egon G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. California, Beverly Hills: Sage Publications
- Moleong, L. J. (2001). *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosydakarya
- Muhadjir, Noeng. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi IV. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- ..... (2001). *Filsafat Ilmu, Positivisme, Post Positivisme dan Post Modernisme*. Edisi II. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Faisal.Sanafiah 1999. *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Dasar Dan Aplikasi*. Malang: YA3

\*\*\*\*\*

### **HUBUNGAN KOMUNIKASI, SUMBER DAYA, DISPOSISI, DAN STRUKTUR BIROKRASI DENGAN EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DESA (P2D) DI KECAMATAN CILENGKRANG KABUPATEN BANDUNG**

Oleh:  
**Nia Pusparini**

#### **ABSTRAKSI**

Implementasi Kebijakan Program Kegiatan Tugas Pembantuan bidang Infrastruktur Pedesaan Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D) belum berjalan efektif yang ditandai dengan berbagai masalah yang



terjadi di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung melatarbelakangi penulisan ini. Salah satu faktor yang diduga menyebabkan tidak efektifnya implementasi kebijakan program P2D tidak optimalnya pelaksanaan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Dari segi sitematika, isi, dan tujuan dari PP Nomor 52/2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Keputusan Bupati Nomor 6/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Rincian Program kegiatan Tugas Pembantuan Kepada Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung direalisasikan ke dalam kegiatan program P2D yang menandakan bahwa pemerintah memprioritaskan pada pembangunan pedesaan, 2) Dampak positif dari kebijakan tugas pembantuan di Kecamatan Cilengkrang ini adalah: masyarakat lebih mudah beraktivitas untuk meningkatkan hasil pertanian, memperlancar transportasi angkutan hasil panen, terpenuhinya sarana prasarana jalan dan sanitasi lingkungan atau terjadinya pemerataan pembangunan di desa, 3) Dampak negatif pelaksanaan tugas pembantuan adalah: pemerintah tidak menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat lokal, waktu pengerjaan melebihi ketentuan, proposal yang diajukan telah diplot oleh pemerintah Kabupaten.

**Kata Kunci : Implementasi Tugas Pembantuan, Program Pembangunan Prasarana Desa (P2D)**

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Edward III. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Q Press. Washington.
- Edwards and Sharkansky, 1980. *The Public Predicement*. WH Freman an Company. San Fransisco.



- Gibson, Ivancevich, & James, Donnely. 1996. *Organisasi Perilaku Struktur Proses*. Jilid Satu. Terjemahan : Nunuk Ardiani. Bina Aksara. Jakarta.
- Hikmat. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2002. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Bandung.
- Stoner, Freeman, R. Edward. 1996. *Manajemen*. (Alih Bahasa Sindoro). PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Sumaryadi. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. PN Citra Utama. Jakarta.
- Syafrudin, Ateng. 2006, *Kapita Selekta, Hakikat Otonomi & Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*, Citra Media (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI- Puslit KP2W Lemlit Unpad, Bandung.
- Tjokroamidjoyo, 1988, *Manajemen Pembangunan*. Haji Masagung. Jakarta.
- Wasistiono, dan M.Irwan, 2006, *Memahami Asas Tugas Pembantuan, Pandangan Legalistik, Teoritik, dan Implementatif*, .PN Fokus Media, Bandung.
- Anonimus, 1945, *Undang-undang Dasar 1945*, Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Anonimus, 2004, *Undang-undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Menteri Dalam Negeri, Jakarta.
- Anonimus, 2005, *Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009*. Sekretariat Negara RI, Jakarta.
- Anonimus, 2001, *Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan*, Menteri Dalam Negeri RI Jakarta,
- Anonimus, 2005, *Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa*, Menteri Dalam Negeri RI, Jakarta.
-



Anonimus 2004, Keputusan Bupati No.6 Tahun 2004 tentang *Petunjuk Pelaksanaan dan Rincian Program Kegiatan Tugas Pembantuan Kepada Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten* Sekretariat Daerah Kabupaten, Soreang.

Anonimus, 2006, Keputusan Bupati Nomor G tahun 2006 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Tugas Pembantuan Bidang Infrastruktur Pedesaan Program P2D.* Sekretariat Daerah, Soreang.

\*\*\*\*\*

## **PROSPEK PENGEMBANG ELEKTRONIK GOVERNMENT UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH**

Oleh:

**Tatang Sugandi**

### **1. Pendahuluan**

Sebagaimana disebutkan dalam TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Nasional Republik Indonesia. Untuk mewujudkan keinginan sebagaimana tertuang dalam TAP MPR diatas, maka yang perlu disiapkan secara simultan sejak awal adalah mengenai aspek manajerialnya yang mencakup manajemen Pemerintahan, manajemen SDM, Manajemen perencanaan, manajemen logistik maupun manajemen keuangannya. Perubahannya lebih diarahkan pada perubahan paradigma yang ada dalam pikiran para birokrat penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembaharuan manajemen pemerintahan pemerintahan daerah dilakukan dengan cara :

- 1) Memperkuat dan memperluas peranan serta fungsi unit perencanaan Daerah;



- 2) Merefungsionalisasi peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparaturnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim Kominfo go. Id. tahun 2004 arsip berita Kominfo.  
Anonim Inpres no. 3 tahun 2003 *panduan Kebijakan strategi Nasional e-gov*  
Anonim 2003 Perda Pemerintah daerah kabupaten Ketapang tentang SOTKPD  
DR. Sofyan A. Djalil, 2004 (Mentri Kominfo Pada rapat Kerja telematika di Jakarta)  
Ginandjar Kartasasmita, *Visi Pembangunan Dalam PJP II, Gambaran Masyarakat Indonesia Tahun 2018 dan Tantangannya Bagi Aparatur Negara*.  
Undang undang RI No 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*  
Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia ITB, 3-4 Mei 2005

\*\*\*\*\*

**PERSEPSI MASYARAKAT  
TERHADAP TAYANGAN PELAYANAN PUBLIK  
DI TVRI JAWA BARAT DAN BANTEN  
(Studi Deskriptif Tayangan Sosialisasi Kebijakan Pemerintahan  
di Kota Bandung)**

Oleh:  
**Hana Silvana**

### **ABSTRAKSI**

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang tersajikan dalam media televisi. Media





televisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Jawa Barat dan Banten. UU NO 32/2002 menyebutkan bahwa lembaga penyiaran publik dimiliki oleh badan hukum negara, bersifat independen, netral, tidak komersil dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Objek pada penelitian ini adalah masyarakat Kota Bandung yang menjadi pemirsa TVRI Stasiun Jawa Barat. Adapun tempat Penelitian yang digunakan bersifat terpencair agar lebih mewakili populasi yang ada di Kota Bandung. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pelayanan publik di Kota Bandung dan bagaimana bentuk atau format acara tayangan yang dapat memberikan persepsi positif maupun negatif terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif metode survei yang dibatasi pada pengertian survei sampel, dimana informasi dikumpulkan dari sebagian populasi.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang diperoleh tentang persepsi masyarakat tentang pelayanan publik, mempunyai pengaruh yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi yang terjadi telah membentuk satu cara pandangan dari masyarakat terhadap pelayanan-pelayanan publik. Proses sosialisasi kebijakan pemerintah yang terjadi di Kota Bandung masih memiliki banyak kelemahan, hal ini ditunjukkan oleh durasi siaran yang minim, tidak menjangkau perhatian publik, dan dikarenakan pilihan dari publik itu sendiri yang enggan menyimak tayangan TVRI Stasiun Jawa Barat. Daya tarik komunikator merupakan dimensi yang paling berpengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai pelayanan publik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Albrecht, K. 1983. *Pengembangan Organisasi*. Terjemahan Syaiful Anwar. Bandung: Angkasa.
- Beckhard, Richard. 1981. *Pengembangan Organisasi-Strategi dan Model*. Alih bahasa Ali Saifullah. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bridges, William. 2003. *Managing Transitions*. Cambridge: Basic Books.
- Denhardt, R.B. 2000. *Theories Of Public Organization*. 3<sup>rd</sup> edition. Orlando: Harcourt Brace College Publishers. USA.



- Dessler, Gary. Manajemen Sumber Daya Manusia. Alih bahasa Benyamin Molan. 1998. Jakarta : PT. Dadi Karyadi Abadi
- Djumara, Noorsyamsa (Ed.). Menuju Format Baru Pelayanan umum (Kumpulan Makalah yang Disajikan dan Ditulis pada Diskusi Panel dalam rangka Ulang Tahun ke-36 Lembaga Administrasi Negara, Tanggal 4 Mei 1994). 1994. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Gasperz, Vincent. 1988. Sistem Informasi Manajemen (Suatu Pengantar). Bandung : CV. Armico.
- Gibson, Rowan (Ed.). *Rethinking The Future*. Alih bahasa Wandu S. Brata dan Hikmat Kusumaningrat. 2000. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gouillart, Francis, and Kelly J. 1995. *Transforming The Organization*. New York: Mc.Graw-Hill, Inc.
- Hardjito, Dydiet. Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian. 2001. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Hunsaker, Phillip. 2001. *Training in Management Skills*. New Jersey: Prentice Hall.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsudin dan Wilopo (Ed.). Seminar Nasional Mewirausahakan Birokrasi untuk Menyejahterakan Rakyat. 2006. Malang: PT Dinar Wijaya-Brawijaya University Press.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. 1989. Perubahan dan Pengembangan Organisasi. Bandung : Sinar Baru
- Kadjatmiko. 2002. Transformasi Manajemen. Majalah Manajemen Usahawan Indonesia : 33-35. LM FE-UI. Jakarta.
- Kasim, Azhar. 1994. Teori Pembuatan Keputusan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Keban, Yermias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik – Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Gaya media.
- Kerlinger, N. Fred. 2004. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Terjemahan Landung R. Simatupang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kotler, Philip. 1994. *Manajemen Pemasaran*. Alih bahasa Hendra Teguh. Jakarta: PT Prenhallindo.



2. Makalah

Kismantoroadji, Teguh. 1991. *Statistika Sosial*. Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung.

Mustopadidjaja, AR. 2000. *Membentuk Pemerintahan Lokal (Local Good Governance) Dalam Menyongsong Otonomi Daerah (Makalah)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Saefullah, A. Djaja. 2004. *Knowledge Accumulation*. (Makalah). Bandung: Fisip Unpad.

3. Dokumen Lain

Jurnal *Governance*. Volume 2, Nomor 5, Januari-Maret 2006. Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.

Jurnal *Governance*. Volume 2, Nomor 6, April-Juni 2006. Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.

Undang-Undang No. 08 Tahun 2005 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.

\*\*\*\*\*

## OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK

Oleh :  
**R. Indriyati**

### ABSTRAKSI

Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan publik yang mengedepankan kepentingan masyarakat atau memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin kepada masyarakat. Pelayanan yang maksimal



ini hanya akan terwujud apabila pemerintah (government) merekonstruksi paradigma pelayanan yang semula bersifat feodal ke arah yang lebih egaliter dan merakyat, mengimplementasikan IT dalam bentuk e-gov sebagai upaya transparansi pelayanan, modernisasi sistem dan perangkat pelayanan.

Adanya komitmen dan konsistensi serta strategi yang jelas dalam upaya memperoleh model yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi hal yang perlu diupayakan. Pemerintah perlu melakukan pemangkasan birokrasi yang berbelit-belit serta menginternalisasikan nilai-nilai pemerintahan solutif kepada tiap-tiap aparat mulai dari pemahaman konsep, implementasi dan evaluasi setiap kegiatan pelayanan. Juga senantiasa melakukan inovasi-inovasi yang secara empirik dapat diterima oleh komunitas masyarakat.

Pemerintahan sebagai sebuah institusi yang melayani kebutuhan publik, sangat penting untuk senantiasa menciptakan suatu mekanisme-mekanisme baru untuk dapat menghasilkan kinerja yang maksimal terhadap pelayanannya kepada masyarakat pengguna jasa.

**Kata Kunci : Pemangkasan Birokrasi, transparansi pelayanan dan inovasi**

#### DAFTAR PUSTAKA

- Etzioni-Halevy, Eva., 1983. Burecracy And Democracy A Political Dilemma, Routledge & Kegan Paul, London*
- Keban, Yermias T., 2004, Enam Dimensi Strategis Adminsitrasi Publik Konsep, Teori Dan Isu, Gaya Media, Yogyakarta*
- Petras , James & Veltmeyer, Henry., 2002. Imperialisme Abad 21, Kreasi Wacana, Yogyakarta*
- PSKK UGM , 2001. Policy Brief, No. 01/PB/2001, Kinerja Pelayanan Publik, Yogyakarta*
- , No. 05/PB/2001, Diskriminasi Dalam Pemberian Pelayanan Publik, PSKK UGM, Yogyakarta*
- Smith, B.C., 1988. Burecracy And Political Power, ST. Martin's Press, New York*
- Winarno, Budi., 2004. Globalisasi Wujud Imperialisme Baru Peran Negara Dalam Pembangunan, Tajidu Press, Yogyakarta*



**PSIKOLOGI SOSIAL SEBAGAI STUDI TENTANG PERILAKU  
MANUSIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN  
KONTEKS SOSIAL**

Oleh:  
**Susy Erwina**

**ABSTRAKSI**

Psikologi social merupakan suatu studi tentang tingkah laku manusia di dalam hubungannya dengan orang lain, kelompok , kultur, norma dan stimulus social lainnya. Psikologi social berkembang dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul mengenai bagaimana manusia beraksi dan apa yang dialaminya di dalam lingkungan social pada saat dia beraksi. Misalnya apa yang dilakukan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dan bagaimana orang lain mempengaruhinya pada saat tertentu serta mencoba menentukan apa yang harus dilakukan .

Dengan mempelajari perilaku social ini , diharapkan dapat diterangkan mengapa seseorang berperilaku tertentu dalam situasi social tertentu. Psikologi social adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai suatu fungsi rangsang social . Yang dimaksud rangsang social di sini adalah manusia dengan segala hasil produksinya, jadi di dalamnya termasuk manusia lain, kelompok social, norma-norma, kultur peradaban dan produk-produk social lainnya . Dikatakan ilmu pengetahuan , karena Psikologi social merupakan hasil pengamatan sistematis .

**DAFTAR PUSTAKA**

- Calhoun, Donald w, 1976.” *Person in Group “*, A Humanistic Social Psychology, Harper & Row, Publishers, New York.Evanstone, San Fransisco.London.
- Krech, David, Crutchfield, Ricard S, Ballachey, Egerton L. 1962. *Individu-Al in Society, A Teks Book of Social Psychology*, MacGraw Hill Book Co.Inc, New York, San Fransisco, Toronto, London, Koga Kusha Co.Ltd.Tokyo.



- Lindzey G, Aronson E. 1955. *The Hand Book of Social Psychology*. Amer Rind Publishing Co. PTV.LTD. New Delhi, Bombay, Calcutta, New York, Second Edition .
- Newcomb Theodore M. 1970. *Social Psychology*. Tavistock Publications LTD.
- Shaw, Marvin E, Costanzo, Philip R. 1967. *Theories of Social Psychology*. MacGraw Hill Book Company, New York, St. Louis, San Fransisco , Toronto, London, Sydney.
- Sherif, Carolyn Wood. 1967. *Orientation in Social Psychology*. Harper & Row, Publishers, New York, Hagerstown, San Fransisco, London

\*\*\*\*\*

**REFORMASI BIROKRASI:  
Membangun Semangat Baru Administrasi Publik.**

Oleh:  
**Tatang Parjaman - Dosen FIA Universitas Subang**

***ABSTRACT***

*This paper explains the extent to which Indonesia have taken up new public management (NPM) reforms which begin by paradigm shift on Public Administrations. While Indonesia has taken up elements of the NPM agenda, It isn't adopted anything remotely near the entire package. Moreover, plenty of reform initiatives are going on that are unrelated or even contrary to that agenda. New public management ideas are influential, but more so at the level of rhetoric than practice.*

*The paper goes on to examine the argument that the new public management is inappropriate to developing countries on account of problems such as corruption and low administrative capacity, including Indonsia. There are NPM success stories as well as failures in the developing world. The outcome of individual NPM initiatives depends on localised contingency factors rather than any general national*



*characteristics. Reformers need to keep an open mind as to what may work and what may not, and to be guided by the needs of the situation.*

**Keywords:** *paradigm shift, NPM, Beurocracy reform*

### DAFTAR PUSTAKA

1. Cooper, Phillip J., *Public Administration for Twenty First Century*, Orlando, Florida: Harcourt Brace, 1998.
2. Donovan, O', Ita, *Organization Behaviour in Local Government*, Longman Group, Great Britain, 1994.
3. Dwiyanto, Agus, *Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: Dari Government ke Governance*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta, 21 Agustus 2004
4. Ferlie, Ewan. Ashburner, Lynn. Fitzgerald, Louise dan Pettigrew, Andrew, *The New Public Management in Action*, Oxford University Press, New York, 1996.
5. Hodge, B.J. Anthony, P, William dan Gales, Lawrence, *Organization Theory A Strategic Approach*, fifth edition, Prentice Hall, New Jersey, 1996.
6. Hughes, E, Owen, *Public Management And Administration*, St. Martin's, United States of America, 1994.
7. Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun, "Birokrasi di Dunia Ketiga: Alat Rakyat, Alat Penguasa, atau Penguasa", dalam *Prisma*, edisi, 10 Oktober 1990.
8. Miles, E, Raymond, *Theories of Management : Implications for Organizational Behavior and Development*, Mc Graw-Hill Book Company, United States of America, 1975.
9. Osborne, David dan Gaebler, Ted, *Mewirauahakan Birokrasi : mentransformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik jilid 2* (terjemahan), PPM, Jakarta, 1992.
10. Osborne, David dan Plastrik, Peter, *Memangkas Birokrasi : lima strategi menuju pemerintahan wirausaha* (terjemahan), PPM, Jakarta, 1997.



11. Pollit, et.al., *Public Management Reform – A Comparative Analysis*, Oxford, New York, 2000.
12. Robbins, Stephen, *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi* (terjemahan), Prenhalindo, Jakarta, 1996.
13. Russell, Joyce dan Bernardin, John, *Human Resources Management An Experiential Approach*, Mc. Graw, Singapore, 1993
14. Utomo, Warsito, *Administrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
15. Winarno, Budi, *Globalisasi: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2008.
16. Wright, Peter. Kroll, J, Mark. Parnell, John, *Strategic Management Concept and Cases*, Prentice Hall, New Jersey, 1996.

\*\*\*\*\*

## **SUMBER DAYA MANUSIA PADA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

Oleh :

**M. Ikrar Budijaya - Dosen Luar Biasa Fisip Unnur**

### **ABSTRAKSI**

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sehingga benar – benar menjunjung nilai – nilai demokrasi dan kemandirian yang berakar pada masyarakat setempat. Oleh karenanya pemerintah khususnya pemerintah daerah diharapkan dapat memahami dan memberikan perhatian pada sumber daya manusia dengan melalui pelatihan dan pengembangan yang akan meningkatkan mutu pelayanan publik di setiap sektor pelayanan publik, sehingga bagaimana cara melaksanakan pelayanan tersebut secara efisien dan efektif dan dapat mengukur kinerja pelayanan publik yang telah diberikan.

Upaya perbaikan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan teknis





maupun teori dan menyusun model dan strategi pelayanan publik pada setiap unit organisasi pelayanan. Model dan strategi pelayanan yang lebih operasional dan implementatif sebagai suatu solusi perbaikan kualitas pelayanan publik ini juga merupakan cara untuk mempertemukan harapan masyarakat dan harapan penyedia pelayanan dalam mempertanggung jawabkan akuntabilitasnya kepada pemberi mandat atau kepada masyarakat secara langsung.

**Keywords : Human Resource Development the Publik Services**

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Berry, Leonard. L., A. Parasuraman., Marketing Services: Competing
- Sunarno, SH, M,Sc, 4 Agustus 2008, Penataan Birokrasi dan Pembangunan
- Aparatur Negara , LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
- Kajian “PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK”  
Direktur Aparatur Negara Bapenas, 2004.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

\*\*\*\*\*



**PROSPEKTIF HUKUM TERHADAP TRAFIKING  
MENURUT UNDANG-UNDANG DAN RESOLUSI  
DEWAN KEAMANAN PBB**

Oleh:

**Cecep Dudi - Dosen FISIP Universitas Al-Ghifari**

**ABSTRAKSI**

Trafiking memiliki pengertian perdagangan perempuan dan anak. Perdagangan perempuan dan anak adalah sebuah transaksi penjualan antara penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati. trafiking juga mengandung unsur paksaan, penipuan, ancaman kekerasan serta penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan eksploitasi.

Penyebab Trafiking adalah pemahaman tentang hak anak juga masih rendah. Anak oleh sebagian keluarga masih dianggap sebagai milik orang tua, sehingga rentan menjadi korban trafiking. Faktor utama maraknya trafiking terhadap perempuan dan anak adalah kemiskinan, pendidikan, perkawinan usia muda, permintaan pasar yang menjanjikan uang cukup besar yang membuat sebagian orang tua tergiur dan menjual anaknya kepada calo pelacuran.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anonymous. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.:*Forum Komunikasi Ormas/LSM untuk Perempuan*, Jakarta , 1994.
- \_\_\_\_\_. Islam, Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan, *Makalah Seminar Nasional*, Yogyakarta 27-29 Juli 2000.
- \_\_\_\_\_. Pusat Komunikasi Kesehatan Berperspektif Jender. *Buku saku: Stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pusat Komunikasi Kesehatan Berperspektif Jender, Jakarta, 1999.
- \_\_\_\_\_. Beyond Borders: Reproductive Health, AIDS and Gender Violence as Global Issue. Brazil: Reproductive Health Affinity Group Meeting, October 1999.



Beijing Platform of Action no. 113 dalam Herlina, Apong: 1998.

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, Forum Komunikasi Ormas, LSM untuk Perempuan, 1994.

Herlina, Apong. Kekerasan terhadap Perempuan di Dunia Kerja. *Seminar Jender dan Kekerasan: Gambaran Masalah dan Tinjauan ke Depan dan Peluncuran Paket Prosiding Studi Jender dan Pembangunan*. Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Depok, September 1998.

Kalyanamitra. *Menghadapi Pelecehan Seksual*. Jakarta: Kalyanamitra, April 1999.

Kalibonso, Rita Serena. Kekerasan terhadap Perempuan dalam rumah tangga: Fakta Diskriminasi Perempuan. *Makalah dalam Peringatan Hari Internasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*. Depok, 25 November 2000.

Komariah Emong Supardjaja, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Sari Kuliah, Pasca UNPAD, 2 Mei 2003

Konvensi PBB, Pasal 3 butir a dari *protokol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children*, hlm. 26.

Kollman, Nathalie. *Kekerasan terhadap Perempuan*. YLKI dan Ford Foundation, Jakarta, 1998.

Morris, Marika. *Violence against women and girls. A fact sheet for CRIAW*. Updated March 2002.

Moeljatno, Cet. XI, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, hlm. 109

Perdagangan Manusia, Soal Lama yang Tak Diselesaikan Tuntas Senin, 16

September 2002

Moeljatno, Cet. XI, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, hlm. 109

Rancangan Undang-Undang tentang *Pemberantasan Perdagangan (Trafiking)*

*Perempuan dan Anak*, Pasal 1 (1), Jakarta, 2003, hlm. 2

Rifka Annisa, Women's Crisis Center, terpetik dalam *Triningtyasasih, Kekerasan*

dalam Rumah Tangga, Yogyakarta, 1997.



Solichan Arief, *Jatim Rentan Perdagangan Perempuan*, Kompas, Selasa 11 Maret

2003

Sofian, Ahmad, et al. *Menggagas Tempat yang Aman Bagi Perempuan*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM bekerja sama dengan Ford Foundation, Yogyakarta, 2002.

Triningtyasasih. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rifka Annisa Women's Crisis Center, Yogyakarta, Juni 1997.

\*\*\*\*\*

## **KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN HUKUM**

Oleh:

**Dudung Abdurroup**

### **1. Pendahuluan**

Dengan pembangunan diharapkan akan terciptanya masyarakat yang sejahtera tentram lahir batin. Perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha untuk menciptakan ketentraman lahir dan batin bagi masyarakat. Salah satunya dengan menjaga keutuhan dan kerukunan rumah tangga (keluarga) yang bahagia, aman, dan damai yang merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga yang merupakan subsistem terkecil dari masyarakat.

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi tindak kekerasan dalam kehidupan rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga ditengah upaya mengurangi kekerasan dibutuhkan peran serta masyarakat dan penerapan hukum yang menyeluruh oleh negara.



Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang melanggar hukum walaupun dianggap masalah pribadi karena terjadi dalam lingkungan keluarga serta nilai masyarakat yang selalu ingin tampak harmonis dan karenanya sulit mengakui akan adanya masalah dalam rumah tangga. Namun demikian yang menjadi pertimbangan terbesar pada diri korban sehingga tidak melapor adalah kekhawatiran korban akan proses hukum dan sistem hukum yang tidak berpihak kepada korban, sehingga pada akhirnya korban justru malah terombang-ambing oleh proses hukum yang tidak jelas dan berlarut-larut. Selain itu, korban juga enggan melalui proses hukum yang memang memerlukan waktu cukup panjang atau lama untuk menyelesaikan kasusnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku-Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy. J.2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan keduapuluh empat, Edisi revisi. Bandung: Rosdakarya.
- Achie, Sudiarti, Luhulima, 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: PT. Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 2004. *Sosiologi Keluarga*, Cetakan ketiga. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ihromi, T.O. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Edisi II. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Goode, William J. 2002. *Sosiologi Keluarga*, Cetakan V. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution. 2007. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cetakan IX. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khirudin. 2002. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta:Liberti.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Alwasilah, A.Chaeder. 2003. *Pokoknya Kualitatif*, Cetakan II. Jakarta: PustakaJaya.
- Mardalis. 2003. *Metode Penelitian*, Cetakan IV. Jakarta: Bumi Aksara.



- Muhidin, Syarif. 1992. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Cetakan VI. STKS Bandung.  
Dokumen dan Sumber Lain  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  
Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 28.  
Profil Pemberdayaan Perempuan.  
Profil Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan.  
Pikiran Rakyat Minggu, 21 November dan 11 Februari 2007.  
Pikiran Rakyat Selasa, 30 Desember 2003.  
Pikiran Rakyat Senin, 28 Mei 2001. *Almira at-Thahirah Kekerasan Rumah Tangga Produk Kapitalisme (Kritik atas Persoalan KDRT)*.  
Dinas Sosial RI. 2004. *Pedoman Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan*.  
Dinas Sosial Jawa Barat. 2003. *Pedoman Umum Penanganan Korban Tindak Kekerasan di Provinsi Jawa Barat*.

\*\*\*\*\*